

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung

Trivianti Lestari¹, Heru Nurasa², Mas Halimah³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran

Email: Trivianti20001@mail.unpad.ac.id

Abstrak, Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah pemerintahan daerah di Jawa Barat yang terkena dampak dari pencemaran dan kerusakan sungai Citarum yang disertai dengan banjir akibat luapan sungai Citarum, tepatnya pada daerah Soreang, Baleendah, Majalaya sampai ke wilayah Rancaekek. Dampak dari pencemaran sungai Citarum ialah timbulnya permasalahan kesehatan, gagal panen hingga kurangnya pasokan air bersih. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis dengan menggunakan *literature review* dengan teknik pengumpulan data dari buku, artikel, website yang kredibel di nasional maupun internasional. Hasil penelitian ini ialah terdapat permasalahan yang terjadi terkait efektifitas, efisiensi serta kecukupan pada program Citarum Harum ini yang masih belum dapat berjalan dengan baik sehingga progress dalam program Citarum Harum ini belum tercapai secara maksimal.

Kata kunci: Pencemaran sungai, program citarum harum, Kabupaten Bandung

Abstract, Bandung Regency is one of the local government areas in West Java that is affected by pollution and damage to the Citarum river which is accompanied by flooding due to the overflow of the Citarum river, precisely in the Soreang, Baleendah, Majalaya areas to the Rancaekek area. The impact of Citarum river pollution is the emergence of health problems, crop failure to the lack of clean water supply. This study uses a descriptive analysis method using a literature review by taking data from books, articles, websites that are credible at national and international levels. The results of this study are that there are problems that occur related to the effectiveness, efficiency and adequacy of the Citarum Harum program which still cannot run well so that progress in the Citarum Harum program has not been achieved optimally.

Keywords: Pollution river, citarum harum programme, Bandung Regency

1. Pendahuluan

Sungai merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan meningkatnya tingkat mobilitas manusia tanpa memikirkan keadaan alam sekitar. Banyaknya pembangunan rumah dan industri yang dibangun di sekitar Daerah Aliran Sungai yang biasa disebut dengan DAS, yang menyebabkan masyarakat dan industri ini membuang sampah dan limbah langsung ke dalam sungai. Penyebabnya ialah kurangnya pengetahuan serta kurangnya empati dari masyarakat akan dampak dari membuang limbah ke dalam sungai. Salah satunya ialah pada sungai terbesar di Jawa Barat yaitu sungai Citarum yang pada tahun 2013 dinobatkan sebagai sungai yang tercemar di dunia menurut *Green Cross Switzerland* dari Swiss dan *Blacksmith Institute* dari New York (Belinawati et al., 2018).

maka dari itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum sebagai langkah awal strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran pada Sungai Citarum

Pada gambar dibawah ini menunjukkan bibliometrik dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai pencemaran sungai. Peneliti menggunakan VOSviewer untuk mempermudah menemukan novelty dari penelitian ini dengan mengekstrak artikel dari database Scopus dengan kata kunci "*pollution river*" AND "*policy*". Ditemukan sebanyak 1.350 artikel dan 775 kata kunci yang berkaitan dengan pencemaran sungai. Dapat dilihat bahwa untuk kata kunci yang menghubungkan "pencemaran sungai" dan "kebijakan" sangat kecil serta warna itemnya yang lebih gelap menunjukkan bahwa penelitian itu sudah lama dilakukan. Beberapa penelitian di Scopus mengenai pencemaran sungai banyak dilakukan di luar negeri seperti Jepang (Mabaya et al., 2017; Sharifinia et al., 2016; Zhang et al., 2015), Iran (Afkhami et al., 2007; Basatnia et al., 2018; Fatemi, 2020), Hongkong (Lyu et al., 2017), Malaysia (Afroz et al., 2014), Swedia (Andersson et al., 2014) dan negara-negara lain. Maka dari itu penelitian ini memiliki novelty karena penelitian ini dilakukan di Indonesia.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah di Jawa Barat yang terkena dampak dari pencemaran dan kerusakan sungai Citarum yang disertai dengan banjir akibat luapan sungai Citarum. Tepatnya pada daerah Soreang, Baleendah, Majalaya sampai ke wilayah Rancaekek. Selain banjir yang merendam beberapa rumah warga di daerah tersebut. Terdapat kurangnya sosialisasi serta keterlibatan aparat penegak hukum untuk mengedukasi masyarakat dalam aktivitas pengelolaan limbah industri, peternakan dan juga pertanian yang menjadi alasan kuat penyebab ketidaklayakan kualitas air sungai Citarum, serta timbulnya permasalahan lain yaitu masalah kesehatan yang terjadi di wilayah tersebut. Tercatat sepanjang tahun 2017 angka kunjungan masyarakat ke Puskesmas di daerah Kabupaten Bandung sebanyak 7.625 orang yang mengeluhkan penyakit pernafasan karena dampak cerobong asap dari pabrik hingga masalah pencernaan (Sumantri & Rahmani, 2020).

tahun 2025 mendatang, melainkan memuat output program dengan jangka satu tahun. Khusus untuk tahun 2020, Rencana Aksi menargetkan output program ini dengan menjadikan baku mutu air Sungai Citarum naik klasifikasi menjadi kelas IV (empat) yang apabila target ini tercapai maka air Sungai Citarum dapat dipergunakan untuk mengairi pertanian, pertanaman atau peruntukkan lain yang mensyaratkan baku mutu air yang serupa. Namun, menurut (Sumantri & Rahmani, 2020) kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Bandung masih mengandung unsur logam berat yang berasal dari limbah pabrik tekstil yang membuang limbahnya langsung kedalam sungai Citarum sementara menurut (Rohmawati et al., 2018) kadar air yang masih mengandung unsur logam berat tidak dapat dikategorikan maupun digunakan untuk keperluan pertanian ataupun irigasi. Maka dari itu dapat dilihat bahwa output tahun 2020 pada program Citarum Harum belum tercapai sepenuhnya untuk penggunaan air sungai Citarum untuk penggunaan bidang pertanian, pertanaman atau peruntukkan lain yang mensyaratkan baku mutu air yang serupa.

b. Efisiensi

Efisiensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketepatan cara (usaha kerja) untuk mencapai sesuatu tanpa membuang waktu, tenaga, biaya serta dapat menjalankan tugas secara benar dan akurat. Dalam proses kebijakan Citarum Harum ini menggunakan personel TNI sebagai pelaksana utama untuk melakukan aksi operasi baik dari segi penanganan limbah, pengolahan sampah hingga memberikan Pendidikan kepada masyarakat (Perpres No 15 Tahun 2018). Pada program ini, personel TNI dibagi kedalam 21 sektor yang tersebar di sepanjang aliran DAS Citarum yang pada masing-masing sektornya dipimpin oleh seorang Komandan Sektor.

Pembagian aliran DAS Citarum kedalam sektor ini telah disesuaikan dengan keadaan dan permasalahan di setiap wilayah di sekitar aliran DAS Citarum. Kabupaten Bandung berada di wilayah sektor 21 yang bertugas khusus untuk menuntaskan permasalahan anak-anak sungai Citarum dan mensosialisasikan Pendidikan pembuangan limbah terhadap perusahaan-perusahaan di sekitar DAS Citarum di Kabupaten Bandung untuk tidak membuang limbah kedalam sungai secara langsung tanpa menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam menentukan apakah air limbah yang berasal dari perusahaan itu aman untuk dibuang kedalam sungai, diperlukannya pengujian pada sampel limbah dan dibawa ke sebuah laboratorium, sedangkan untuk melakukan pengujian ini diperlukan biaya yang tidak sedikit karena banyaknya perusahaan di wilayah Kabupaten Bandung dan tidak memungkinkan untuk di uji lab secara berkala.

Maka dari itu, Komandan Sektor 21 Citarum Harum membuat sebuah inovasi dalam menekan biaya untuk melakukan uji kualitas air limbah dengan melakukan pembuatan kolam kecil pada tahap akhir pengolahan limbah sebelum disalurkan kedalam sungai. Dalam kolam itu harus diisi dengan ikan hias atau ikan Ko'i karena ikan-ikan tersebut sangat rentan terhadap virus dan bakteri, apabila ikan tersebut mati berarti ada yang salah saat melakukan pengolahan air limbah atau bahkan perusahaan tidak melakukan pengolahan sama sekali dan perusahaan dilarang untuk membuang limbah

tersebut kedalam sungai. Ini merupakan sebuah inovasi yang diberikan dan terbukti dapat menekan pengeluaran biaya untuk melakukan uji lab bagi masing-masing perusahaan di wilayah Kabupaten Bandung. Namun disisi lain masih ada perusahaan-perusahaan yang membuang langsung limbah perusahaan kedalam sungai di waktu malam hari agar tidak diketahui oleh personel TNI di wilayah, ini menjadikan tugas personel di lapangan bertambah dimalam hari untuk melakukan operasi limbah di malam hari. Ini menunjukkan bahwa belum ada teknologi yang dapat menentukan titik dimana limbah B3 ini masuk kedalam sungai untuk memudahkan mobilisasi personel Citarum Harum pada saat ada perusahaan yang sengaja membuang limbah B3 langsung kedalam sungai (Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Provinsi Jawa Barat, 2019).

c. Kecukupan

Dalam sistem kebijakan public, kecukupan dapat dikatakan sebagai visi yang telah dicapai sudah mencukupi dalam berbagai aspek yang dijalankan dalam sebuah kebijakan. Kecukupan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah apakah pelaksanaan serta sumberdaya dalam menunjang program Citarum Harum ini sudah optimal atau belum. Dalam program Citarum Harum ini selain melibatkan TNI, POLRI dan Pemerintah juga melibatkan pihak lain yang tergabung kedalam sistem kolaborasi pentahelix yang terdiri antara Pemerintah, pebisnis, komunitas, akademisi dan media. Kolaborasi *pentahelix* ini ditargetkan akan membantu sekitar 15-20% dari output program Citarum Harum (Humas.jabarprov, 2019).

Namun dalam pelaksanaannya, *pentahelix* ini belum menyentuh target tersebut walaupun progress yang dilakukan melalui kolaborasi pentahelix belum menyentuh pada target, tetapi sudah banyak aksi yang dilakukan pada kolaborasi ini seperti pengiriman mahasiswa dalam Kuliah Kerja Nyata di wilayah sepanjang DAS Citarum serta penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak universitas untuk dapat memberikan masukan dan pengembangan dalam program Citarum Harum ini. Selain kolaborasi pentahelix ini, pada program Citarum Harum ini membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pelaksanaan program ini seperti pembangunan IPAL komunal bagi perusahaan-perusahaan yang masih bersifat mikro karena untuk menggunakan IPAL dalam suatu perusahaan dibutuhkan biaya yang besar, sehingga banyak perusahaan mikro yang menutup perusahaannya karena tidak sanggup membuat IPAL mandiri, serta pemanfaatan TPA Legoknangka yang sampai saat ini belum juga beroperasi yang menjadikan Kabupaten Bandung belum mempunyai tempat pembuangan sampah sendiri (Lestari, 2019).

d. Perataan

Perataan yang dimaksud ialah keadilan yang diberikan dalam menunjang sebuah kebijakan dilihat dari sasaran-sasaran sebagai penerima manfaat. Dalam pelaksanaan program Citarum Harum personel TNI dibagi ke dalam 22 Sektor dan setiap sektor dibagi lagi kedalam subsektor di setiap titik wilayah DAS Citarum. Kabupaten Bandung terdapat pada Sektor 21 dan mempunyai 14 subsektor yang tersebar di Kabupaten Bandung yang

pada masing-masing subsector memiliki wilayah sasaran dan permasalahan masing-masing. Jadi dalam menjalankan program Citarum Harum di Kabupaten Bandung sudah merata di setiap titik wilayah. Di wilayah Kabupaten Bandung itu sendiri, anggota satgas sudah membangun tempat pembuangan sampah sementara yang tersebar di setiap desa agar masyarakat tidak perlu lagi membuang sampah ke dalam sungai Citarum. Selain itu, anggota satgas juga selalu melakukan sosialisasi berkala dengan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung atau dengan dinas-dinas terkait secara merata di setiap desa di wilayah Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, anggota tim satgas sudah berusaha untuk menjalankan fungsinya, hanya tinggal masyarakat wilayah Kabupaten Bandung ikut berpartisipasi mendukung program Citarum Harum ini.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam evaluasi kebijakan merupakan sebuah tanggapan dari sasaran kebijakan dari suatu aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini responsivitas yang diberikan terkait tanggapan dari masyarakat di sepanjang wilayah DAS Citarum mengenai keterlibatan TNI dalam membantu program revitalisasi sungai Citarum karena hanya dalam jangka waktu beberapa bulan, sungai Citarum sudah mulai berubah secara signifikan secara visual seperti berkurangnya sampah dan terlihat sosialisai antara TNI dan masyarakat yang humanis serta aksi yang dilakukan pihak TNI dalam menyelesaikan masalah limbah perusahaan dengan diliput oleh media menjadi respon positif yang diberikan oleh masyarakat.

Jika melihat responsivitas dari masyarakat Kabupaten Bandung, sebagian masyarakat sudah mendukung program citarum harum dengan baik seperti membantu dalam kegiatan kerja bhakti secara berkala bersama anggota tim satgas hingga melaporkan perusahaan yang membuang limbah B3 ke dalam sungai kepada anggota tim satgas. Hal ini sangat membantu anggota tim satgas dalam menjalankan tugasnya. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang masih belum tertarik pada program citarum harum dengan masih membuang sampah ke dalam sungai dan juga masih ada perusahaan-perusahaan yang membuang limbah B3 tanpa diolah terlebih dahulu menggunakan IPAL.

f. Ketepatan

Ketepatan dilihat sebagai pencapaian kegiatan apakah sudah cocok dan tepat dilaksanakan di lingkungan. Jika dilihat pada program Citarum Harum ini, program-program kebijakan apa saja yang akan dilaksanakan serta outputnya sudah dibuat sebelum program Citarum Harum ini dimulai yang menjadikan saat program ini dilaksanakan sudah terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan terkait permasalahan apa saja yang terjadi di beberapa titik wilayah di sekitar DAS Citarum lalu membagi personel ke dalam beberapa sector dan subsector. Maka dari itu tingkat ketepatan dalam menjalankan program ini dinilai tidak ada permasalahan yang begitu signifikan kecuali permasalahan-permasalahan teknis yang dapat saja terjadi di sepanjang pelaksanaan program.

4. Kesimpulan

Dalam mengatasi permasalahan pencemaran Sungai Citarum di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum sebagai Langkah awal dalam strategi revitalisasi Sungai Citarum. Namun, dalam implementasi Program Citarum Harum ini belum berhasil menyelesaikan target program tahunan yaitu berupa tercapainya baku mutu air Sungai Citarum menjadi kelas IV yang diperuntukkan untuk mengairi pertanian dan pertamanan. Maka dari itu peneliti melakukan evaluasi terhadap program Citarum Harum dengan menggunakan teori 6 evaluasi kebijakan dari William N Dunn yaitu, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Peneliti menggunakan sistem *literature review* dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menyelesaikan penelitian ini. Menurut hasil yang peneliti dapatkan, terdapat permasalahan yang terjadi terkait efektifitas, Efisiensi serta Kecukupan pada program Citarum Harum ini yang masih belum dapat berjalan dengan baik sehingga progress dalam program Citarum Harum ini belum tercapai secara maksimal. Terkait dengan Responsivitas masyarakat dan lingkungan dan Ketepatan pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program ini dirasa tidak ada permasalahan yang berdampak pada berjalannya program Citarum Harum.

5. Daftar Pustaka

- Afkhami, M., Shariat, M., Jaafarzadeh, N., Ghadiri, H., & Nabizadeh, R. (2007). Regional water quality management for the Karun-Dez River basin, Iran. *Water and Environment Journal*, 21(3), 192–199. <https://doi.org/10.1111/j.1747-6593.2007.00070.x>
- Afroz, R., Masud, M. M., Akhtar, R., & Duasa, J. B. (2014). Water pollution: Challenges and future direction for water resource management policies in malaysia. *Environment and Urbanization ASIA*, 5(1), 63–81. <https://doi.org/10.1177/0975425314521544>
- Andersson, I., Jarsjö, J., & Petersson, M. (2014). Saving the Baltic Sea, the Inland Waters of Its Drainage Basin, or Both? Spatial Perspectives on Reducing P-Loads in Eastern Sweden. *Ambio*, 43(7), 914–925. <https://doi.org/10.1007/s13280-014-0523-x>
- Basatnia, N., Hossein, S. A., Rodrigo-Comino, J., Khaledian, Y., Brevik, E. C., Aitkenhead-Peterson, J., & Natesan, U. (2018). Assessment of temporal and spatial water quality in international Gomishan Lagoon, Iran, using multivariate analysis. *Environmental Monitoring and Assessment*, 190(5). <https://doi.org/10.1007/s10661-018-6679-2>
- Belinawati, R. A. P., Soesilo, T. E. B., Asteria, D., & Harmain, R. (2018). Sustainability: Citarum River, government role on the face of SDGs (water and sanitation). *E3S Web of Conferences*, 52, 1–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200038>
- Creswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi ke-4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fatemi, A. (2020). Strategies and policies for water quality management of Gharasou River, Kermanshah, Iran: a review. *Environmental Earth Sciences*, 79(11). <https://doi.org/10.1007/s12665-020-08997-2>
- Hidayat, Y., Murti Laksono, K., Wahjunie, E. D., & Panuju, D. R. (2013). Pencirian Debit Aliran Sungai Citarum Hulu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 18(2), 109–114.
- Lestari, Trivianti. 2019. *Strategi Tim Satuan Tugas dalam Melaksanakan Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum di Kabupaten Bandung*. Skripsi
- Lyu, X. P., Zeng, L. W., Guo, H., Simpson, I. J., Ling, Z. H., Wang, Y., Murray, F., Louie, P. K. K., Saunders, S. M., Lam, S. H. M., & Blake, D. R. (2017). Evaluation of the effectiveness of air pollution control measures in Hong Kong. *Environmental Pollution*, 220, 87–94. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.09.025>
- Mabaya, G., Unami, K., & Fujihara, M. (2017). Stochastic optimal control of agrochemical pollutant loads in reservoirs for irrigation. *Journal of Cleaner Production*, 146, 37–46. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.108>
- Rohmawati, S. M., Sutarno, S., & Mujiyo, M. (2018). Kualitas Air Irigasi Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 31(2), 108. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v31i2.11958>
- Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Provinsi Jawa Barat. (2019). *Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 148.
- Sharifinia, M., Mahmoudifard, A., Gholami, K., Namin, J. I., & Ramezanpour, Z. (2016). Benthic diatom and macroinvertebrate assemblages, a key for evaluation of river health and pollution in the Shahrood River, Iran. *Limnology*, 17(1), 95–109. <https://doi.org/10.1007/s10201-015-0464-5>
- Sumantri, A., & Rahmani, R. Z. (2020). Analisis Pencemaran Kromium (VI) berdasarkan Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) pada Hulu Sungai Citarum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat 2018. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 19(2), 144–151. <https://doi.org/10.14710/jkli.19.2.144-151>
- Zhang, L. S., Jiang, J. Q., Feng, Y., & Li, G. H. (2015). Case analysis and enlightenment of foreign typical water environment comprehensive improvement. In S. W.-P. & K. J.C.M. (Eds.), *International Conference on Frontier of Energy and Environment Engineering, ICIEEE 2014* (pp. 421–426). CRC Press/Balkema. <https://doi.org/10.1201/b18135-85>